

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Umum tentang Telepon Seluler Rekondisi

1. Pengertian Telepon Seluler

Telepon seluler (*handphone*) adalah perangkat komunikasi berbasis elektronik yang memiliki kemampuan dasar seperti telepon konvensional saluran tetap namun dapat dibawa kemana – mana atau bisa disebut juga portable atau mobile yang dalam penggunaannya tidak memerlukan jaringan kabel. Telepon seluler (*handphone*) adalah salah satu bukti dari perkembangan teknologi dalam penyampaian informasi dimana dari masa ke masa mengalami perkembangan.

Telepon seluler (*handphone*) digunakan sebagai perangkat portabel dalam sarana komunikasi seperti penyampaian informasi dari suatu pihak ke pihak yang lainnya, seperti telepon (panggilan), kemudian melakukan panggilan dengan menampilkan video seseorang yang kita telepon (*videocall*), alat pembayaran portabel, menonton televisi secara online (streaming mengirim pesan (*short message service*), pengingat waktu (*alarm*), kalender, kalkulator, radio, foto dan alat multimedia seperti menonton video, permainan, mendengarkan musik, dan menampilkan gambar.⁷

Selain fitur-fitur tersebut, telepon seluler (*handphone*) sekarang sudah ditanamkan fitur komputer yang biasanya kita sebut sebagai telepon seluler pintar (*smartphone*). Telepon seluler pintar (*smartphone*) adalah telepon genggam yang mempunyai kemampuan tingkat tinggi, terkadang dengan fungsi yang menyerupai komputer. Bagi

⁷Jurnal Hukum tentang Telepon seluler, http://eprints.dinus.ac.id/19078/10/bab2_18415.pdf, diakses pada 10 Januari 2019

beberapa orang, telepon pintar merupakan telepon yang bekerja menggunakan seluruh piranti lunak sistem operasi yang menyediakan hubungan standar dan mendasar bagi pengembang aplikasi. Bagi yang lainnya, telepon pintar hanyalah merupakan sebuah telepon yang menyajikan fitur canggih seperti surel (surat elektronik), internet dan kemampuan membaca buku elektronik (*e-book*) atau terdapat papan ketik (baik *built-in* maupun eksternal) dan konektor VGA. Dengan kata lain, telepon pintar merupakan komputer mini yang mempunyai kapabilitas sebuah telepon.⁸

Kebanyakan alat yang dikategorikan sebagai telepon pintar menggunakan sistem operasi yang berbeda. Dalam hal fitur, kebanyakan telepon pintar mendukung sepenuhnya fasilitas surel dengan fungsi pengatur personal yang lengkap. Fungsi lainnya dapat menyertakan miniature papan ketik QWERTY, layar sentuh atau D-pad, kamera, pengaturan daftar nama, penghitung kecepatan, navigasi piranti lunak dan keras, kemampuan membaca dokumen bisnis, pemutar musik, penjelajah foto dan melihat klip video, penjelajah internet, atau hanya sekedar akses aman untuk membuka surel perusahaan, seperti yang ditawarkan oleh Blackberry. Fitur yang paling sering ditemukan dalam telepon pintar adalah kemampuannya menyimpan daftar nama sebanyak mungkin, tidak seperti telepon genggam biasa yang mempunyai batasan maksimum penyimpanan daftar nama.⁹

2. Telepon Seluler Rekondisi

Rekondisi sendiri adalah tindakan mengembalikan sesuatu ke kondisi yang baik atau baru dengan mengubah, memperbaiki, atau mengganti bagian tertentu yang dahulunya

⁸ Tinjauan tentang Telepon Seluler, <https://anzdoc.com/queue/ii-tinjauan-pustaka-21-telepon-selular-ponsel.html>, diakses pada 10 Januari 2019

⁹ Ponsel Cerdas (Smartphone), https://id.wikipedia.org/wiki/Ponsel_cerdas, diakses pada 11 Januari 2019

tidak berfungsi menjadi berfungsi seperti baru. Apabila mengacu kepada pengertian rekondisi maka Telepon Seluler (*handphone*) rekondisi adalah telepon seluler bekas atau telepon seluler yang tidak berfungsi kemudian yang diperbaiki dengan mengganti bagian – bagian tertentu yang membuat telepon seluler kembali berfungsi seperti baru.¹⁰

Adapun beberapa faktor pembeda yang membedakan telepon seluler rekondisi dengan telepon seluler asli atau baru, yaitu :

1. Harga telepon seluler

Faktor pertama adalah harga, harga merupakan salah satu faktor pembeda yang tidak teknis, namun cukup menjadi indikator penting pada telepon seluler rekondisi. Sebelum membeli telepon seluler, alangkah baiknya melakukan survey terlebih dahulu untuk memastikan bahwa harga telepon seluler di pasaran dengan penawaran yang diberikan sama, apabila ternyata harga yang ditawarkan jauh berada di harga pasaran, dapat diduga bahwa telepon seluler tersebut merupakan telepon seluler rekondisi. Selain itu, kartu garansi yang diberikan toko bukan merupakan suatu acuan karena kartu garansi biasanya ada dalam satu paket penjualan telepon seluler saat ini, selain kabel data, kepala *charger*, dan juga buku panduan.

2. Mengecek langsung bentuk fisik telepon seluler

Bentuk fisik telepon seluler rekondisi memang sangat identik dengan bentuk aslinya namun tetap akan ada perbedaan antara telepon seluler rekondisi dengan telepon seluler asli. Untuk memastikan bahwa telepon seluler tersebut rekondisi atau telepon

¹⁰ Op.cit

seluler asli, alangkah baiknya sebelum membeli disarankan untuk mengecek informasi singkat tentang ponsel yang akan dibeli setidaknya paling tidak kita dapat mengetahui bentuk fisik dan material yang digunakan sehingga apabila ada bagian yang terlihat berbeda maka patut diduga bahwa telepon seluler tersebut merupakan telepon seluler rekondisi.

3. Menggunakan aplikasi pihak ketiga

Untuk memastikan telepon seluler tersebut rekondisi atau asli, kita bisa menggunakan aplikasi gratis yang tersedia di toko aplikasi (Google Play Store & Apple Store). Ada beberapa aplikasi yang dapat digunakan untuk mengetahui informasi pasti tentang ponsel tersebut di antaranya adalah AnTuTu Benchmark atau CPU-Z.

AnTuTu biasanya digunakan untuk menguji *benchmark* sebuah ponsel. Dalam hasil pengujian biasanya akan disertakan data dan juga performa ponsel. Setelah telepon seluler diuji dengan aplikasi AnTuTu dan hasil pengujian diperoleh, maka kita bandingkan dengan ulasan terkait ponsel itu dari sumber lain, misalnya di internet atau media lain dan apabila hasil pengujian berbeda jauh dengan ulasan yang ada, patut diduga bahwa telepon seluler tersebut tidak asli atau rekondisi. Sementara aplikasi CPU-z digunakan untuk mengetahui informasi dan spesifikasi seputar telepon seluler tersebut, selain itu kita dapat membandingkan informasi dari laman resmi vendor atau situs internet yang pernah mengulasnya, dengan begitu kita akan mengetahui apakah telepon seluler tersebut rekondisi atau asli.

4. Memastikan nomor IMEI dan nomor Seri telepon seluler

Setiap telepon seluler dipastikan memiliki nomor IMEI dan Seri-nya masing-masing. Untuk itu, ketika membeli sebuah telepon seluler, tak ada salahnya untuk terlebih dulu mengecek nomor IMEI dengan menekan tombol *#06# dan juga mengecek nomor Seri yang ada di dalam telepon seluler kemudian kita cocokkan dengan Nomor IMEI dan nomor Seri yang tertera pada kotak penjualan. Apabila terdapat perbedaan antara nomor IMEI dan nomor Seri yang ada di telepon seluler dengan nomor IMEI dan nomor Seri yang tertera pada kotak penjualan maka patut diduga bahwa telepon seluler tersebut merupakan telepon seluler rekondisi.

Apabila kita kurang yakin, ada cara lain yaitu mengecek langsung nomor IMEI di situs (imei.info.) yang akan memunculkan informasi lebih tentang ponsel yang dimaksud dengan demikian kita akan mengetahui bahwa telepon seluler tersebut merupakan telepon seluler rekondisi atau asli.

5. Uji kamera

Salah satu yang tak lepas dari kemampuan sebuah telepon seluler adalah kemampuan untuk mengambil gambar/ kamera. Untuk itu, kamera dapat dijadikan salah satu indikator pembeda anatara telepon seluler rekondisi dengan telepon seluler asli.

Untuk membedakan telepon seluler rekondisi dengan telepon seluler asli, kita harus mengetahui kualitas dari telepon seluler tersebut namun sebelum mencoba, sebaiknya kita memiliki informasi tentang kemampuan atau spesifikasi kameranya. Kemudian kita ambil gambar dan bandingkan antara kemampuan atau spesifikasi kamera dengan hasil gambar yang sudah diambil menggunakan telepon seluler tersebut. Apabila hasilnya tidak

mencerminkan kualitas kamera dan berbeda dengan spesifikasi yang ada, dapat diduga bahwa telepon seluler tersebut merupakan telepon seluler rekondisi.¹¹

B. Hak dan Kewajiban Konsumen dan Pelaku Usaha

1. Hak dan Kewajiban Konsumen

a. Pengertian Konsumen

Sebelum membahas mengenai hak dan kewajiban konsumen, ada baiknya kita memahami dulu apa pengertian dari konsumen itu sendiri. Istilah konsumen berasal dari alih bahasa dari kata *consumer* (Inggris – Amerika) atau, *consument/konsument* (Belanda). Secara harfiah, arti kata *consumer* adalah (lawan dari produsen) setiap orang yang menggunakan barang. Tujuan penggunaan barang atau jasa nanti akan menentukan termasuk konsumen kelompok mana pengguna tersebut. Begitu pula Kamus Bahasa Inggris-Indonesia memberi arti kata *consumer* sebagai pemakai atau konsumen.¹²

Peraturan perundang – undangan negara lain, memberikan berbagai perbandingan. Umumnya dibedakan antara konsumen antara dan konsumen akhir. Dalam merumuskannya, ada yang secara tegas mendefinisikannya dalam ketentuan umum perundang – undangan tertentu, ada pula yang termuat dalam pasal tertentu bersama – sama dengan pengaturan sesuatu bentuk hubungan hukum.¹³

¹¹ Liputan 6, *Membedakan Rekondisi dengan Asli*, <https://www.liputan6.com/tekno/read/2412170/5-cara-simpel-bedakan-ponsel-android-asli-atau-palsu>, diakses pada 11 Januari 2019

¹² Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, (Jakarta : Diadit Media, 2001), hlm. 3

¹³ Ibid.

Tampaknya perlakuan hukum yang lebih bersifat mengatur dan/atau mengatur dengan diimbahi perlindungan, merupakan pertimbangan tentang perlunya pembedaan dari konsumen itu. Az. Nasution menegaskan beberapa batasan tentang konsumen, yakni:

- a. Konsumen adalah setiap orang yang mendapatkan barang atau jasa digunakan untuk tujuan tertentu;
- b. Konsumen antara adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/jasa untuk digunakan dengan tujuan membuat barang dan/jasa lain atau untuk diperdagangkan (tujuan komersial);
- c. Konsumen akhir adalah setiap orang alami yang mendapat dan menggunakan barang dan/atau jasa untuk tujuan memenuhi kebutuhan hidupnya pribadi, keluarga dan atau rumah tangga dan tidak untuk diperdagangkan kembali (nonkomersial).

Bagi konsumen antara, barang atau jasa itu adalah barang atau jasa kapital, berupa bahan baku, bahan penolong atau komponen dari produk lain yang akan diproduksinya (produsen). Bagi konsumen akhir, barang dan/jasa itu adalah barang atau jasa konsumen, yaitu barang atau jasa yang biasanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi, seperti keluarga atau rumah tangganya (konsumen).¹⁴

Adapun pengertian konsumen menurut Pasal 1 ayat (2) Undang – Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, mengatakan bahwa konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

¹⁴ Az. Nasution, *op. Cit. Hlm.* 13.

b. Hak dan kewajiban konsumen

Istilah perlindungan konsumen berkaitan dengan perlindungan hukum. Oleh karena itu, perlindungan konsumen mengandung aspek hukum. Adapaun materi yang mendapatkan perlindungan itu bukan hanya sekedar fisik melainkan lebih pada hak – hak yang sifatnya abstrak. Perlindungan konsumen identik dengan perlindungan yang diberikan hukum tentang hak – hak konsumen. Secara umum dikenal ada 4 (empat) hak dasar konsumen, yaitu :

- a) Hak untuk mendapatkan keamanan (*the right to safety*)
- b) Hak untuk mendapatkan informasi (*the right to be informed*)
- c) Hak untuk memilih (*the right to choose*)
- d) Hak untuk didengar (*the right to be heard*).

Empat hak dasar ini diakui secara internasional. Dalam perkembangannya, organisasi konsumen yang tergabung dalam *international organization of Consumer Union (IOCU)* menambah lagi beberapa hak seperti hak untuk mendapatkan pendidikan konsumen, hak untuk mendapatkan ganti kerugian, dan hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Namun, tidak semua organisasi konsumen menerima penambahan hak – hak tersebut. Mereka bebas untuk menerima semua atau sebagian. YLKI, misalnya memutuskan untuk menambahkan satu hak lagi sebagai pelengkap empat hak dasar konsumen, yaitu hak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sehingga keseluruhan dikenal sebagai panca hak konsumen.

Hak konsumen sebagai tertuang dalam pasal 4 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah sebagai berikut :¹⁵

- a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;*
- b. hak untuk memilih barang dan/*
- c. atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;*
- d. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;*
- e. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;*
- f. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;*
- g. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;*
- h. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;*
- i. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;*
- j. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.*

Adapun mengenai kewajiban konsumen dijelaskan dalam Pasal 5 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu :

¹⁵ Pasal 4 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

- a. membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;*
- b. beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;*
- c. membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;*
- d. mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.*

2. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

a. Pengertian pelaku usaha

Dalam Pasal 1 angka 3 Undang – Undang No.8 Tahun 1999 disebutkan pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.¹⁶

Dalam penjelasan undang-undang yang termasuk dalam pelaku usaha adalah perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor dan lain-lain. Seperti halnya konsumen, pelaku usaha juga memiliki hak dan kewajiban. Pengaturan hak-hak dan kewajiban-kewajiban pelaku usaha dapat bersumber pada peraturan perundangan yang bersifat umum dan juga perjanjian/kontrak yang bersifat khusus.

b. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Hak pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah:¹⁷

¹⁶ Pasal I Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

¹⁷ Pasal 6 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

- a. hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;*
- b. hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;*
- c. hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;*
- d. hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;*
- e. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.*

Kewajiban-kewajiban pelaku usaha menurut ketentuan Pasal 7 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah:

- a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;*
- b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;*
- c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;*
- d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;*
- e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;*

- f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Bila diperhatikan dengan seksama, tampak bahwa hak dan kewajiban pelaku usaha bertimbal balik dengan hak dan kewajiban konsumen. Ini berarti hak bagi konsumen adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha. Demikian pula dengan kewajiban konsumen merupakan hak yang akan diterima pelaku usaha. Bila dibandingkan dengan ketentuan umum di Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tampak bahwa pengaturan UUPK lebih spesifik, karena di UUPK pelaku usaha selain harus melakukan kegiatan usaha dengan itikad baik, ia juga harus mampu menciptakan iklim usaha yang kondusif, tanpa persaingan yang curang antar pelaku usaha. Kewajiban-kewajiban pelaku usaha juga sangat erat kaitannya dengan larangan dan tanggung jawab pelaku usaha.

C. Perjanjian Jual Beli

1. Perjanjian

Secara Istilah perjanjian merupakan terjemahan dari kata *overeenkomst* yang berasal dari bahasa Belanda atau *contract* yang berasal dari bahasa Inggris. Menurut ketentuan Pasal 1313 KUHPerdata pengertian dari perjanjian tersebut adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dari pengertian tersebut terlihat bahwa perjanjian tersebut mengandung unsur, yaitu:¹⁸

¹⁸ Handri Rahardjo, Hukum Perjanjian di Indonesia, Jakarta : Pustaka Yustisia, 2009, hlm. 45.

- 1) Unsur perbuatan Dalam perjanjian, kata perbuatan ini lebih tepat apabila digantikan dengan kata perbuatan hukum. Karena perbuatan tersebut menimbulkan akibat hukum bagi para pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian.
- 2) Unsur satu orang atau lebih terhadap satu orang atau lebih Untuk membuat suatu perjanjian, harus terdapat paling sedikit dua pihak yang saling berhadap-hadapan dan saling memberikan pernyataan. Pihak tersebut terdiri atas orang atau badan hukum.
- 3) Unsur mengikatkan dirinya Suatu perjanjian, terdapat pihak yang memberikan pernyataan untuk bersepakat dan mengikatkan dirinya terhadap pihak lainnya untuk melakukan perjanjian. Dalam perjanjian ini orang yang terikat kepada akibat hukum yang muncul karena kehendaknya sendiri.

Dari unsur-unsur tersebut menyiratkan bahwa suatu perjanjian melahirkan kewajiban atau prestasi dari satu atau lebih orang atau pihak kepada satu atau lebih orang atau pihak lainnya yang berhak atas prestasi tersebut serta konsekuensi hukum bahwa dalam suatu perjanjian akan selalu ada dua pihak, dimana satu pihak sebagai pihak yang wajib berprestasi, dan pihak lainnya sebagai pihak yang berhak atas prestasi tersebut.

Menurut Subekti, suatu perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain, atau dimana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Abdul Kadir Muhammad menyebutkan bahwa dalam suatu perjanjian harus termuat beberapa unsur, yaitu:

- a. Ada pihak-pihak Pihak-pihak yang ada disini paling sedikit harus ada dua orang. Para pihak bertindak sebagai subyek perjanjian tersebut. Subyek mana bisa terdiri dari manusia atau badan hukum. Dalam hal para pihak terdiri dari manusia, maka orang tersebut harus telah dewasa dan cakap untuk melakukan hubungan hukum.

- b. Ada tujuan yang akan dicapai Suatu perjanjian haruslah mempunyai satu atau beberapa tujuan tertentu yang ingin dicapai, dan dengan perjanjian itulah tujuan tersebut ingin dicapai, baik yang dilakukan sendiri maupun oleh pihak lain, yang dalam hal ini mereka selaku subyek dalam perjanjian tersebut, para pihak terikat dengan ketentuan bahwa tujuan tersebut tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan dan ketertiban umum.
- c. Ada Prestasi yang harus dilaksanakan Para pihak dalam suatu perjanjian mempunyai hak dan kewajiban tertentu yang satu dengan yang lainnya saling berlawanan. Apabila pihak yang satu berkewajiban untuk memenuhi satu prestasi, maka bagi pihak lain hal tersebut adalah merupakan hak dan begitupun sebaliknya.
- d. Ada bentuk tertentu Suatu perjanjian dapat dibuat secara lisan maupun tertulis.
- e. Ada syarat-syarat tertentu Dalam suatu perjanjian tentang isinya, harus ada syarat-syarat tertentu karena dalam suatu perjanjian menurut ketentuan Pasal 1338 21 KUHPerdara ayat satunya menentukan bahwa, “suatu perjanjian atau persetujuan yang sah adalah mengikat sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, dan agar suatu perjanjian bisa dikatakan sebagai suatu perjanjian yang sah adalah bilamana perjanjian tersebut telah memenuhi syarat-syarat tertentu”.

Pengertian lain mengenai perjanjian adalah suatu hubungan hukum yang merupakan peristiwa bertemunya dua perbuatan hukum yang masing-masing berisi penawaran (aanbad) dan penerimaan (aanvarding), yang melahirkan kata sepakat atau persuaian kehendak diantara para pihak. Suatu perjanjian dapat dibuat baik dalam bentuk kata-kata secara lisan, maupun dalam bentuk tertulis. Perjanjian yang dibuat secara tertulis

dituangkan kedalam bentuk akta, biasanya perjanjian yang dibuat secara tertulis (akta) dipergunakan untuk kepentingan pembuktian.

Pelaksanaan perjanjian menurut hukum perdata diatur dalam KUHPerdato buku ketiga Pasal 1233 hingga Pasal 1456, konsep perjanjian secara mendasar termuat dalam Pasal 1313 KUHPerdato yang menegaskan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Dalam KUHPerdato buku ketiga menganut sistem terbuka, dimana hukum memberikan kebebasan dan keleluasaan kepada para pihak untuk mengatur pola hubungan hukumnya. Sifat terbuka tersebut terlihat dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdato yang mengandung asas kebebasan berkontrak, yakni setiap orang bebas untuk menentukan bentuk, macam dan isi perjanjian asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kesusilaan dan ketertiban umum, dan sesuai dengan syarat perjanjian yang berlaku. Dalam setiap perjanjian terdapat asas yang mendasari, yaitu:

a. Asas kebebasan berkontrak (freedom of contract). Asas kebebasan berkontrak dapat dianalisis dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdato, yang berbunyi :

“ Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya ”. Asas ini merupakan suatu asas yang memberikan

kebebasan kepada para pihak untuk :

- a) Membuat atau tidak membuat perjanjian;
- b) Mengadakan perjanjian dengan siapa pun;
- c) Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratan serta;
- d) Menentukan bentuk perjanjiannya apakah tertulis atau lisan;

- b. Asas konsensualisme (*consensualism*). Asas konsensualisme dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdata. Pasal tersebut ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak. Asas ini merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian tidak diadakan secara formal, melainkan cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak.
- c. Asas kepastian hukum (*pacta sunt servanda*). Asas kepastian hukum disebut juga dengan asas *pacta sunt servanda* merupakan asas yang berhubungan dengan akibat perjanjian, diatur dalam pasal 1338 KUHPerdata. Asas ini merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagai layaknya sebuah undang-undang. Dimana pihak lain diluar perjanjian tersebut tidak boleh melakukan intervensi terhadap kontrak yang dibuat para pihak
- d. Asas itikad baik (*good faith*). Asas itikad baik tercantum dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata yang berbunyi: “*Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik*”. Asas ini menjelaskan bahwa para pihak, yaitu debitur dan kreditur harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh maupun kemampuan baik dari para pihak.
- e. Asas kepribadian (*personality*). Asas kepribadian merupakan asas yang menunjukkan bahwa seseorang yang akan melakukan dan membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Hal ini dapat dilihat Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUHPerdata. Pada Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUHPerdata menyatakan :
- a. “*Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri.*” Kemudian pasal 1340 KUHPerdata menyatakan bahwa “*Perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya*”.

Secara *lex generalis*, syarat sah perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdato yaitu:

- a) *Adanya kata sepakat;*
- b) *Cakap untuk membuat suatu perjanjian;*
- c) *Mengenai suatu hal tertentu;*
- d) *Suatu sebab yang halal.*¹⁹

2. Perjanjian Jual Beli

Pengertian jual beli terkandung dalam Pasal 1457 KUHPerdato yakni, “ *suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang dan pihak lainnya untuk membayar harga yang dijanjikan* ”. Berdasarkan rumusan Pasal 1457 tersebut, dapat dilihat bahwa jual beli merupakan suatu bentuk perjanjian yang melahirkan kewajiban atau perikatan untuk memberikan sesuatu yang dalam hal ini terwujud dalam bentuk penyerahan kebendaan yang dijual oleh penjual dan penyerahan yang oleh pembeli kepada penjual, karena jual beli didalam hukum adalah salah satu bentuk perjanjian.

Jual beli merupakan perjanjian konsensual, yang artinya sudah dilahirkan sebagai suatu perjanjian yang sah pada saat tercapainya kata sepakat antara kedua belah pihak. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 1458 KUHPerdato yang menyatakan bahwa jual beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar.

¹⁹ Salim H.S., Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, Jakarta : Sinar Grafika, 2003, hlm. 49

Dalam jual beli terdapat pihak penjual dan pihak pembeli, pihak penjual atau pelaku usaha adalah setiap orang yang memproduksi atau memperdagangkan barang dan atau jasa kepada pembeli. Pihak pembeli adalah setiap orang yang membeli dan memakai barang tersebut baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain.

Perjanjian jual beli merupakan perbuatan hukum, dimana perjanjian jual beli tersebut terjadi karena adanya kata sepakat antara dua orang atau lebih. Masing-masing orang tersebut memiliki perannya, satu orang menjadi pihak penjual dan satu orang lainnya sebagai pihak pembeli, penjual dan pembeli tersebutlah yang menjadi subyek dari perjanjian jual beli. Pada dasarnya semua orang atau badan hukum dapat menjadi subyek dalam perjanjian jual beli. Objek yang dapat menjadi objek jual beli yaitu semua benda bergerak dan tidak bergerak, baik menurut tumpukan berat, ukuran, dan timbangannya, sedangkan yang tidak diperkenankan untuk di perjualbelikan adalah:²⁰

- a. Benda atau barang orang lain;
- b. Barang yang tidak diperkenankan oleh undang-undang seperti obat terlarang;
- c. Bertentangan dengan ketertiban, dan
- d. Kesusilaan yang baik.

Untuk menentukan apa yang dapat menjadi objek jual beli, Pasal 1457 KUHPerdara menggunakan istilah *zaak*. Menurut Pasal 499 KUHPerdara, *zaak* adalah barang atau hak yang dimiliki, hal tersebut berarti bahwa yang dapat perjual belikan tidak hanya barang yang dimiliki, tetapi melainkan juga suatu hak atas suatu barang yang bukan hak milik.

²⁰ M. Yahya Harahap, Segi-segi Hukum Perjanjian, Bandung : Alumni, 1986, hlm. 181.

Asas kebebasan berkontrak memberikan kebebasan kepada para pihak untuk menentukan bentuk suatu perjanjian, terdapat dua bentuk perjanjian jual beli yaitu:

1. Perjanjian dalam bentuk lisan, yakni suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam wujud lisan dan hanya berdasarkan kesepakatan dan kepercayaan diantara para pihak.
2. Perjanjian dalam bentuk tertulis, yakni perjanjian yang dituangkan ke dalam bentuk tertulis atau akta, akta tersebut terbagi atas dua macam yaitu:
 - 1) Akta autentik Pengetian mengenai akta autentik terdapat dalam Pasal 1868 KUHPdata, yaitu suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat. Akta autentik dapat berupa akta notaris, akta pejabat pembuat akta tanah (PPAT), akta hipotik. Apabila terjadi sengketa terkait isi ataupun pelaksanaan perjanjian, maka segala hal yang terdapat dalam akta tersebut selalu dianggap benar.
 - 2) Akta dibawah tangan Akta dibawah tangan atau onderhands merupakan akta yang dibuat oleh para pihak tanpa adanya perantaraan seorang pejabat. Dalam Pasal 1874 KUHPdata menyebutkan bahwa akta dibawah adalah tulisan yang ditandatangani dan dibuat tanpa perantaraan atau bantuan seorang pejabat umum.

D. Tanggungjawab dan Perbuatan Melawan Hukum

1. Tanggung Jawab

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.

Menurut hukum perdata dasar pertanggungjawaban dibagi menjadi dua macam, yaitu kesalahan dan risiko. Dengan demikian dikenal dengan pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (*liability without based on fault*) dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan yang dikenal (*liability without fault*) yang dikenal dengan tanggung jawab risiko atau tanggung jawab mutlak (*strick liability*).

Prinsip dasar pertanggung jawaban atas dasar kesalahan mengandung arti bahwa seseorang harus bertanggung jawab karena ia melakukan kesalahan karena merugikan orang lain. Sebaliknya prinsip tanggung jawab risiko adalah bahwa konsumen penggugat tidak diwajibkan lagi melainkan produsen tergugat langsung bertanggung jawab sebagai risiko usahanya.²¹

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu :

- a) Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
- b) Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort lilability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*interminglend*).
- c) Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strick liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun

²¹ Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010, hlm 49

tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.²²

2. Perbuatan Melawan Hukum

Istilah perbuatan melawan hukum berasal dari bahasa Belanda disebut dengan istilah (*onrechmatige daad*) atau dalam bahasa Inggris disebut *tort*. Kata (*tort*) berkembang sedemikian rupa sehingga berarti kesalahan perdata yang bukan dari wanprestasi kontrak. Kata (*tort*) berasal dari bahasa Latin (*torquer*) atau (*tortus*) dalam bahasa Prancis, seperti kata (*wrong*) berasal dari bahasa Prancis (*wrung*) yang berarti kesalahan atau kerugian (*injury*).²³

Menurut Pasal 1365 KUHPerdata, yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain. Dalam ilmu hukum dikenal 3 (tiga) kategori perbuatan melawan hukum, yaitu sebagai berikut :

- a) Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan.
- b) Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian).
- c) Perbuatan melawan hukum karena kelalaian.

²² Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, 2010, hlm 503

²³ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 3